



Kabar Pemilu
Nomor 3, Februari 2009

Politik Uang di Saat Krisis Keuangan

Kurang dari dua bulan lagi rakyat Indonesia akan memberikan suara dalam pemilu di bulan April 2009 untuk ketiga kalinya sejak pulihnya demokrasi tahun 1998 sementara kampanye sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Tak kurang dari 38 partai politik turut ambil bagian dan surat kabar sarat dengan pemberitaan tentang kampanye di seluruh negara ini untuk mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memenangkan kursi DPR itu penting untuk dapat turut menentukan siapa yang akan menjadi presiden RI berikutnya. Pemerintahan Indonesia sekarang berjalan dengan perpaduan sistem presidensial dan sistem multi-partai. Nominasi untuk presiden hanya dapat dilakukan oleh partai yang terwakili dalam DPR.

Begitu terpilih, presiden sebagai kepala eksekutif berwenang menunjuk anggota kabinetnya. Mengingat banyaknya partai baru yang muncul sejak jatuhnya kediktatoran Order Baru Suharto tahun 1998, DPR di periode mendatang ini, seperti juga sebelumnya, akan terdiri dari berbagai partai. Tampaknya tak ada yang bakal mendapatkan mayoritas suara. Jadi sekarang ini fokusnya adalah membentuk koalisi.

Fokus penting lainnya adalah korupsi yang telah merongrong sistem politik selama bertahun-tahun. Sementara tak ada yang bisa membantah bahwa korupsi yang telah menjadi bagian kehidupan politik di Indonesia merupakan pengiring demokrasi yang kehadirannya tak terelakkan, perlu dipikirkan apakah kondisi partai politik sekarang ini adalah bagian dari persoalan itu.

Menurut undang-undang partai politik yang berlaku sejak dimulainya reformasi (masa reformasi yang mengiringi jatuhnya Suharto), kepengurusan partai politik harus menjangkau paling sedikit 60 persen dari semua provinsi yang ada di Indonesia dan juga paling sedikit 50 persen dari kabupaten, kecamatan dan kota madya yang ada dalam provinsi-provinsi itu.

Dalam suatu negara sebesar Indonesia, mengurus partai politik dan mempertahankan sarana yang efektif untuk mempublikasikan dan mempromosikan program partai serta kegiatan kesehariannya memerlukan biaya teramat besar. Meskipun persyaratan itu berat, 38 partai berhasil melewati ambang batas itu, sehingga dengan demikian mereka akan turut serta dalam pemilihan legislatif.

Tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat menggalang dana yang diperlukan untuk menggerakkan mesin elektoral mereka? Dan seperti apakah konsekuensi krisis keuangan global yang merupakan pukulan hebat bagi ekonomi Indonesia sementara kampanye semakin semarak?

Bendera partai di mana-mana

SEMAKIN MENINGKATNYA PERAN POLITISI BERKANTONG TEBAL

Dalam beberapa tahun terakhir ini, terdapat perubahan penting dalam banyak partai dengan masuknya pengusaha-pengusaha berduit dalam jajaran kepemimpinan mereka.

Contoh yang paling mencolok adalah Golkar, yang kepemimpinannya jatuh di tangan Jusuf Kalla, pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan. Ia mengalahkan Akbar Tandjung dalam perebutan kursi kepemimpinan partai pada bulan Desember 2004, hanya dua bulan setelah pemilihan presiden. Untuk pertama kalinya di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung seperti dalam pemilihan presiden AS. Calon yang berhasil adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla, yang memenangkan suara mayoritas yang lumayan. Tetapi hanya dalam hitungan hari, timbul masalah besar .

Fokus penting lainnya adalah korupsi yang telah merongrong sistem politik selama bertahun-tahun

Kendaraan politik SBY, Partai Demokrat, adalah partai baru yang berpenampilan lumayan sebagai partai tingkat menengah tanpa mencapai mayoritas absolut dalam DPR. Jusuf Kalla adalah anggota Golkar yang terpendang, tetapi masih jauh di bawah tokoh partai yang paling berpengaruh. Golkar memenangkan hampir 25 juta suara, sehingga memperoleh 21,6% dari kursi DPR yang menjadikannya partai terbesar di DPR. Ini berarti bahwa *backing* Golkar sungguhlah penting, khususnya karena Akbar Tandjung, yang menjadi ketua partai saat itu, berkeras hati untuk menjadi oposisi pemerintahan yang baru terpilih itu. Pada bulan Desember 2004, kongres nasional Golkar diadakan di Bali dan pada saat terakhir Jusuf Kalla muncul dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi pimpinan. Meskipun banyak yang meragukan, ternyata ia memenangkan jumlah mayoritas dengan 326 suara sedangkan lawannya mendapatkan 156. Saat itu ada dugaan bahwa sejumlah besar uang dibayarkan untuk para delegasi agar berpindah suara memilih Jusuf Kalla.

Istilah 'politik uang', yang kini sudah membudaya, dipandang sebagai hal yang

wajar dalam politik Indonesia selama berpuluh-puluh tahun, tetapi setelah jatuhnya Suharto tahun 1998, istilah itu memiliki arti baru. Sementara dalam masa Orde Baru, aliran uang datang hanya dari satu sumber, kroni Suharto; politik uang di saat Suharto sudah tidak berkuasa menjadi kian kompleks. Kekuasaan tak lagi berada dalam tangan satu kelompok saja dan kepentingan ekonomi sangat beragam.

Hal ini tercermin kuat dalam DPR. Selama masa Suharto, DPR tak lebih dari sekedar stempel; undang-undang tak pernah dirumuskan oleh DPR tapi dibuat oleh eksekutif dan disahkan menjadi undang-undang tanpa ada suara dari DPR. Saat itu, hanya ada tiga partai: Golkar selalu menduduki mayoritas besar kursi, PDI menempati segelintir kursi dan PPP mewakili arus Islam. Pada prakteknya ini adalah sistem satu partai yang tampak sebagai sistem demokrasi.

Setelah Suharto tak lagi berkuasa, DPR menjadi lembaga yang kuat, yang menjalankan tugas kelembagaannya dengan rajin dan kerja keras. Tetapi saat ada undang-undang penting dalam pembahasan, politik uang berperan. Sering kali kepentingan usaha kelas kakap berada di balik lolosnya suatu undang-undang dengan menyuap anggota dewan. Praktek-praktek semacam itu banyak dilaporkan dalam media masa dan diketahui masyarakat luas. Banyak skandal korupsi yang melibatkan anggota dewan terkuak tahun 2007 dan 2008 berkat kegiatan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan SBY dan JK.

Faktanya sederhana saja, bahwa kampanye menelan banyak biaya; jika tak ada cukup uang, sebagian anggota dewan bisa tergiur untuk melakukan praktek yang melanggar hukum itu. Praktek semacam itu juga dibantu dengan cara menduduki posisi baik dalam pemerintahan pusat, pemerintah daerah atau legislatif.

Karena tak ada dana dari pemerintah partai biasanya bergantung pada iuran keanggotaan dan sumbangan para pendukungnya untuk membiayai ongkos kampanye mereka, mencetak brosur dan stiker untuk mempopulerkan citra partai; menyewa gedung untuk pertemuan masa atau peralatan tata

suara untuk mengadakan pertemuan-pertemuan akbar di tempat terbuka; atau membagi-bagikan kaos dan paket sembako untuk menarik calon pemilih yang mungkin sudah menempuh jarak cukup jauh untuk menghadiri acara partai. Tetapi Indonesia jelas bukanlah satu-satunya negara yang tak lagi memiliki partai dengan keanggotaan masa, sehingga tak dapat dihindari adanya partai yang akan berusaha menggalang dana dengan cara tak semestinya atau tergantung pada individu atau usaha yang makmur untuk dapat terus bergerak.

LEDAKAN KORUPSI DI ANTARA ANGGOTA DEWAN DAN PEJABAT PEMERINTAHAN PROVINSI

Pada jaman Suharto semua pimpinan pemerintahan provinsi dan kabupaten seperti gubernur dan bupati menjabat karena diangkat, sekarang mereka dipilih. Banyak ketidakpuasan di antara masyarakat terkait dengan sejumlah besar pilkada dalam dua tahun terakhir ini dan jumlah orang yang tak menggunakan hak pilihnya meningkat pesat. Sekarang ini banyak yang mengeluh: "Kita tak sanggup membayar harga demokrasi, biaya penyelenggaraan pilkada terlalu besar."

... politik uang di masa setelah Suharto tak lagi berkuasa menjadi kian kompleks. Kekuasaan tak lagi berada dalam tangan satu kelompok dan kepentingan ekonomi sangat beragam

Dalam beberapa hal, memang betul Indonesia telah banyak berubah dalam dekade terakhir ini. Pemilihan yang bebas dan jujur menjadi *trademark* di masa pasca-Suharto. Masyarakat sekarang memilih gubernur, bupati, walikota dan anggota dewan di tingkat daerah dan

nasional. Konsekuensi negatifnya adalah soal harga yang melekat dalam setiap posisi terpilih. Seperti di AS, untuk menjadi calon gubernur, misalnya, diperlukan uang untuk berkampanye, membuat pamflet dan membeli waktu tayang di radio dan TV untuk menarik pemilih dari berbagai lapisan masyarakat. Jumlah dana yang dikucurkan sungguh besar. Banyak pemilih tak akan puas dengan kaos serta minuman gratis. Para kandidat biasanya diharapkan memberi paket sembako seperti minyak goreng, beras dan terigu. Apalagi saat seperti sekarang ini ketika krisis ekonomi global mengguncang perekonomian Indonesia.

Kampanye Presiden Obama merupakan peristiwa penting karena tim pemilunya dapat menggalang banyak pendukung baru dan pada saat yang sama mengumpulkan sejumlah besar dana. Demokrasi di Indonesia bergerak ke arah yang sama tetapi dengan perbedaan penting. Sementara calon presiden seperti Barack Obama dapat menggalang banyak dana dari masyarakat, di Indonesia jarang ada calon bupati setempat yang mampu mengumpulkan banyak uang dari para pemilih yang relatif miskin. Faktanya adalah bahwa setiap posisi di kabupaten di Indonesia ada harganya. Di kabupaten yang lebih kaya, harganya bisa mencapai Rp 15 miliar (sekitar US\$1,25 juta). Setiap orang yang ingin menjadi bupati mau tak mau harus membuat kesepakatan dengan pengusaha berkantong tebal untuk mendapatkan dana. Setelah pilkada selesai, bupati terpilih harus membalas kebaikan itu dengan berbagai cara.

Korupsi di DPR mengikuti pola yang sama. Skandal yang terungkap baru-baru ini menunjukkan bahwa badan legislatif itu dapat, misalnya, mengubah total keputusan sebelumnya. Keputusan yang menentukan suatu daerah sebagai cagar alam bisa saja diubah agar pelabuhan komersial dapat dibangun. Di Pulau Bintan, Sumatra, terdapat persengkongkolan yang melibatkan pejabat tinggi dengan suap sebesar Rp 2.25 milyar untuk beberapa anggota DPR. KPK telah mengusut kasus ini dan dua tersangka, Al Amin Nur Nasution dan Aswar Ches Putra, tengah diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Azwar Ches Putra mengaku di muka sidang pengadilan bahwa ia telah menerima suap yang dibayarkan dalam beberapa tahap, dengan mata uang yang berbeda, dari beberapa orang, dan juga mengaku telah menyerahkan sejumlah besar uang untuk anggota-anggota dewan yang lain. Kasus ini melibatkan anggota DPR lainnya seperti Yusuf Erwin Faishal dan Hilam Indra. Sofyan Rebutin (pejabat tinggi di pemerintahan provinsi Sumatra Selatan), Syahril Oesman, (mantan Gubernur Sumatra Selatan) dan pengusaha Chandra Antonio Tan, juga bakal diadili.

Dalam kasus serupa yang terjadi belum lama ini di Sumatra Selatan, hutan bakau yang dilindungi diubah menjadi pelabuhan. Di sini pejabat tinggi, termasuk Gubernur Sumatra Selatan, juga akan muncul di pengadilan sebagai saksi, sementara enam anggota DPR dari Komisi IV tengah menghadapi dakwaan menerima suap. Menurut berita media, Sarjan Tahir dari Partai Demokrat dan rekan-rekannya Sujud Sirajuddin, Mufid Busyairi, I Made Urip, Mawahal Silalahi dan Wowo Ibrahim dari partai lain diduga telah menerima suap dalam jumlah besar.

Suatu kasus yang melibatkan Tamsil Linrung dari partai fundamentalis, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah menimbulkan kehebohan. Partai ini menjadi populer di antara para pemilih karena kampanye anti-korupsinya yang banyak menarik perhatian. Tamsil Linrung sudah mengaku menerima 3 gepok uang: Sin\$2,000 dan Rp12 million tahun 2006 dan US\$2,000 tahun 2007. Uang itu telah dikembalikan ke KPK. Tamsil juga mengatakan bahwa rekan-rekannya sesama anggota PKS di DPR, Suswono, Samsul Hilal dan Anwar Sanusi mengakui bahwa mereka telah menerima suap.

Kasus lain yang spektakuler melibatkan Bank Indonesia, yang merupakan Bank Sentral. Jelaslah sekarang dari kasus-kasus suap ini bahwa memperoleh posisi penting merupakan bisnis yang menggiurkan. DPR mempunyai wewenang untuk menyetujui penunjukan gubernur BI dan wakil-wakilnya. Dalam kasus ini pendekatan dilakukan terhadap anggota DPR untuk memberikan dukungan bagi calon tertentu agar dapat menduduki posisi wakil gubernur. Bulyan Royan dari Partai Bintang

Reformasi tertangkap basah di sebuah hotel dengan uang US\$ 66.000, €5.00 dan Rp79 million. Rekannya, Agus Condro dari PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia –Perjuangan) mengaku menerima Rp 500 juta yang ditransfer ke rekening banknya dan mobil mewah Mercedes Benz baru. Anggota dewan lain yang diduga terlibat kasus ini adalah Hamka Yamdany dan Anthony Zedra Abidin.

Indonesian Corruption Watch (ICW), LSM yang terkenal gencar melakukan kampanye melawan korupsi, menjalankan misinya tanpa lelah dan menghasilkan daftar sembilan anggota DPR yang diduga terlibat kasus korupsi yang lebih kecil seperti penyelewengan dalam penggunaan dana perjalanan dinas ke Inggris, Amerika dan Tanah Suci Mekah, menerima bonus tak sah dan tak membayar pajak.

“Kita tak sanggup membayar harga demokrasi, biaya penyelenggaraan pilkada terlalu besar”

Sebuah badan baru bernama BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dibentuk April 2008 tetapi diperlukan waktu sekian lama sebelum dapat berfungsi dengan baik. Dalam laporan terakhirnya pada Februari 2009, diungkapkan bahwa badan ini mencatat adanya 2.452 kasus, sebagian besar muncul dari keluhan masyarakat. Kasus terbanyak terkait dengan pelanggaran perihal keuangan oleh partai politik. Keluhan ini khususnya menyangkut dua partai: Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya) yang merupakan partai Let. Jen. Prabowo dan Partai Demokrat, partai Presiden SBY. Kedua partai ini dituduh telah “menyuap” masyarakat dengan benih dan pupuk (Gerindra) dan uang tunai (Partai Demokrat).

Sejumlah organisasi masyarakat madani terkemuka telah melakukan kampanye untuk mencegah masuknya kandidat dengan rekam kinerja buruk ke DPR. Gerakan ini disebut Gerakan Nasional Jangan Pilih Politisi Busuk (GANTI POLBUS) dan dilakukan penilaian

terhadap catatan para kandidat menurut empat kriteria kunci: korupsi, isu lingkungan hidup, HAM dan isu jender. Kriteria itu diinterpretasikan dalam cara yang sangat pro-aktif. Misalnya, kandidat menjadi sasaran kampanye meskipun mereka mungkin tak terlibat korupsi secara langsung tetapi menyalah gunakan wewenang mereka untuk menghambat kasus korupsi atau gagal berpartisipasi secara penuh dalam upaya memerangi korupsi.

Organisasi masyarakat madani telah melakukan kampanye untuk mencegah masuknya kandidat dengan rekam kinerja buruk ke DPR

BASIS KEKUASAAN DAN JARINGAN MUKA LAMA

Anggota dewan sebetulnya bergaji besar. Gaji resminya kurang lebih Rp 40 juta (sekitar US\$ 3.500), tetapi selain gaji bulanan itu mereka juga menerima banyak fasilitas seperti mobil dengan sopir, rumah di daerah pemukiman yang makmur, kemudahan kredit dari bank, dan banyak pemasukan lain. Masyarakat tak habis pikir mengapa begitu banyak anggota dewan terpilih yang menjadi sedemikian korupnya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, kewenangan anggota DPR telah meningkat sangat besar dan ini tak terbatas pada pengawasan terhadap pemerintah saja. DPR tak hanya membuat undang-undang baru tetapi juga melakukan revisi undang-undang dan instruksi pemerintah, semua ini dapat menjadi bisnis yang menggiurkan. DPR juga memiliki wewenang untuk menyetujui pengangkatan pejabat tinggi dalam lembaga pemerintahan, termasuk posisi dalam angkatan bersenjata dan Badan Usaha Milik Negara.

Pemupukan kekuasaan itu membuka kesempatan akan adanya jaringan kuat antara

anggota DPR dengan pimpinan partai politik dan pengusaha kelas kakap termasuk bankir besar. Jaringan kontak antara kelompok politik dan kelompok ekonomi berkembang dan uang pun mengalir ke kantong para anggota dewan. Jaringan ini berkembang lebih jauh: semakin banyak kandidat anggota DPR yang ditetapkan tidak atas dasar prestasi tetapi karena hubungan baik mereka dengan pengurus partai. Ini kemudian menentukan konstituante di mana kandidat akan bertarung dan urutannya dalam daftar pemilih partai. Pengusaha berkantong tebal dapat dengan mudah memperoleh karir politik dengan “membeli” nomor jadi dalam daftar kandidat partai.

Politik uang seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tradisi ‘politik uang’ sedikit banyak ada dalam sistem demokrasi di banyak negara. Di dunia barat, pengusaha biasa melakukan banyak lobi dengan parlemen. Di dua negara besar tapi miskin, India dan Indonesia, politik uang melekat kuat, tak hanya karena kesenjangan lebar antara penduduk kaya dan miskin. Yang paling banyak berurusan dengan politik tetaplah kelompok kelas menengah atau mereka yang sudah mapan sedangkan para pemilih membantu dengan memberikan suara sekali dalam empat atau lima tahun ketika pemilu diadakan.

Jaringan kontak antara kelompok politik dan kelompok ekonomi berkembang dan uang pun mengalir ke kantong para anggota dewan

Kecenderungan penting yang muncul setelah ambruknya pemerintahan Suharto adalah soal kesetiaan terhadap pimpinan. Selama masa Suharto politisi tak ubahnya seperti pegawai negeri, mereka menunjukkan tingkat kesetiaan tinggi terhadap pimpinan negara yang membayar gaji mereka setiap akhir bulan. Dalam demokrasi yang umurnya masih muda

seperti Indonesia, karena kucuran uang dari kantong pemerintah jauh berkurang, anggota DPR perlu bekerja lebih keras mencari uang untuk membiayai kantornya, menyumbang partainya dan membina hubungan baik dengan para calon pemilih.

BERKURANGNYA SUBSIDI PARTAI

Masalah korupsi diperparah dengan adanya keputusan tahun 2005 tentang pengurangan subsidi dari negara bagi partai politik. Seorang pengamat mengatakan, “sebagian besar negara dengan alam demokrasi yang mapan menyediakan subsidi dalam jumlah besar bagi partai untuk menghadapi kecenderungan seperti yang telah terjadi di Indonesia.”

Menurut Marcus Mietzner, pengajar kajian Indonesia di Australian National University, 75 persen dari negara penganut paham demokrasi liberal memberi bantuan keuangan kepada partai politik. Lebih lanjut ia berkata: “Semakin kuat demokrasi multipartai, semakin kuat kecenderungannya beranggapan bahwa dana dari negara untuk partai merupakan pilihan terbaik untuk mempertahankan kebebasan dan profesionalisme partai.” [Lihat: Marcus Mietzner, *Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption, Contemporary Southeast Asia*, August 2007].

Korupsi diperparah dengan adanya keputusan tahun 2005 tentang pengurangan subsidi dari negara bagi partai politik

Setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998, tiga partai yang diperbolehkan untuk tetap ada di bawah rejim Orde Baru dihadapkan pada merosotnya pendanaan mereka secara mendadak. Di bawah Suharto, mereka semua memperoleh dana dalam jumlah besar; setelah ia tak lagi berkuasa, Suharto dan keluarganya masih memegang kendali atas simpanan dana berjumlah luar

biasa besarnya yang ditimbun di masa kediktatorannya. Ia mendirikan berbagai yayasan untuk menyalurkan kekayaannya bagi kroni-kroni dan bisnis keluarganya. Ia juga menguasai dana partai sejumlah Rp 900 milyar (sekitar US\$80 juta). Selama berpuluh-puluh tahun ketika Golkar berjaya, cabang-cabang di tingkat provinsi mempunyai cukup uang untuk membiayai kegiatan mereka dari bunga yang diperoleh dari rekening bank mereka. Istilah dana abadi menjadi populer untuk menggambarkan keamanan keuangan mereka. Partai yang telah memonopoli arena politik selama Orde Baru itu kini sadar bahwa ia tak lagi dapat bergantung pada sang tuan penyandang dana yang telah dipermalukan itu setelah ia menegaskan bahwa ia akan terus membiayai Golkar hanya kalau partai itu mau terus berada di bawah kekuasaannya.

Selama lebih dari tiga dekade, Golkar adalah satu-satunya partai yang berkuasa dan tiga pemangku kepentingannya adalah, angkatan bersenjata, birokrat dan pejabat partai, sementara Suharto adalah pengambil keputusan tertinggi. Setelah Mei 1998, Golkar kehilangan monopolinya atas kekuasaan dan menjadi kambing hitam untuk segala sesuatu yang tidak beres di bawah Suharto. Akbar Tandjung, politisi handal yang saat itu menjabat sebagai ketua Golkar, berhasil melakukan konsolidasi partai dan melepaskannya dari cengkeraman klan Suharto. Ia menjauhi banyak pejabat angkatan darat sementara jutaan birokrat yang merupakan anggotanya meninggalkan jajarannya dan menyeberang ke partai lain. Setelah berubah oleh peristiwa yang dramatis itu, Golkar kemudian harus bergantung pada “cukong-cukong” dan para pengusaha kelas kakap agar dapat tetap bertahan.

Dua partai lainnya harus mulai mencari uang dari sumber eksternal. PPP (Partai Persatuan Pembangunan), yang mewakili arus Islam, jauh lebih kecil dari Golkar; partai ini sebelumnya dilarang beroperasi di bawah tingkat kabupaten. Sekarang PPP menghadapi masalah lain untuk mendanai perluasan organisasinya seperti yang disyaratkan oleh ketentuan yang mengharuskan partai mendirikan cabang di tingkat regional dan daerah di sejumlah 60 persen dari provinsi di seluruh Indonesia.

Partai ketiga, partai nasional pimpinan Megawati Sukarnoputri, dengan nama baru PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan), telah kehilangan aset yang tadinya dimiliki dan perlu mulai membangun kerangka kerja partai yang baru mulai dari nol.

Spanduk PDI-P

Tahun 1999, muncullah partai-partai baru yang semuanya ingin turut ambil bagian dalam pemilu pertama yang bebas dan adil sejak pertengahan 1950-an. Meskipun undang-undang tahun 1999 tentang partai politik menyebutkan bahwa partai berhak mendapatkan dana dari negara, tak ada sistem yang mengaturnya, sehingga mereka terpaksa mencari alternatif. Sumber yang paling empuk adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu dan terdiri dari wakil semua partai peserta pemilu.

PDI-P meraup dana resmi dari negara tak kurang dari US\$47 juta antara 2001 dan 2004

Menurut Mietzner, audit yang dilakukan setelah pemilu mendapati bahwa dana KPU sebesar US\$13 juta dari anggarannya yang besar itu telah menguap dan sebagian dibagi-bagi di antara partai yang duduk dalam Komisi. Ada juga berita tentang banyaknya penyelewengan dana dari yang diberikan oleh UNDP. Partai-partai itu sendiri, yang semuanya kekurangan dana selama pemilu, tak menunjukkan rasa bersalah; mereka mengusulkan agar uang sisa dana KPU dibagi-bagikan di antara mereka.

Sementara tak pernah jelas bagaimana dana KPU ini digunakan, dari pengalaman itu dibuatlah keputusan presiden tahun 2003 untuk mengubah komposisi KPU. Wakil-wakil partai politik dikeluarkan dari KPU dan lembaga itu kini terdiri dari tokoh independen saja, sehingga tak lagi dapat dijadikan sumber dana bagi partai.

Ketika Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal sebagai Gus Dur menghadapi pemakzulan (*impeachment*) pada hari-hari terakhirnya sebagai presiden (Oktober 1999 - Juli 2001), keluar peraturan pemerintah mengenai bantuan keuangan bagi partai politik, yang, menurut Mietzner, merupakan langkah yang diambil untuk meredam partai-partai yang ingin memaksanya mundur. Apa pun, ini adalah langkah positif yang memberi dasar lebih pasti bagi pendanaan partai daripada pengaturan pengucuran dana secara *ad hoc* pada praktik sebelumnya.

Peraturan itu menentukan bahwa tiap partai setiap tahunnya akan menerima Rp 1.000 untuk setiap suara yang diperoleh dalam pemilu 1999, sementara pemerintah daerah diperintahkan untuk memberikan subsidi bagi partai lokal sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Berkat peraturan ini, subsidi negara menjadi sumber pendapatan penting bagi partai.

Menurut perhitungan Mietzner, PDI-P, yang muncul sebagai partai utama dalam pemilu 1999, diperkirakan meraup dana resmi dari negara tak kurang dari US\$47 juta antara 2001 dan 2004.

Tetapi pengaturan keuangan yang dibuat Gus Dur ini banyak dikritik dan kemudian dirombak habis-habisan. Tahun 2002, dasar perhitungan pendanaan diubah dari berdasarkan suara menjadi berdasarkan kursi tanpa secara khusus menyebutkan jumlah dana untuk setiap kursi. Tahun 2005, muncul keputusan pemerintah yang menentukan bahwa partai akan menerima Rp 21 juta untuk setiap kursi yang dimenangkan tahun 2004 sementara pemerintah daerah diminta menentukan sendiri besarnya dana yang akan mereka berikan untuk partai.

Rumusan penghitungan berdasarkan kursi ini mengakibatkan anjloknya pendapatan partai besar. Misalnya PDI-P hanya menerima Rp 2,3 milyar pada Januari 2006 dibandingkan dengan Rp 5,7 milyar pada Januari 2004. Peraturan yang baru ini tak banyak disadari oleh para aktivis dan telah menyebabkan kekacauan di antara partai-partai dan juga menimbulkan rasa tak puas yang mendalam di

antara para kader partai di tingkat pusat dan akar rumput.

Dengan berkurangnya subsidi negara, partai politik terpaksa berpaling pada pendukung atau pengusaha berkantong tebal. Sumbangan individu dibatasi menjadi Rp 1 milyar (sekitar US\$84.000) dan sumbangan perusahaan Rp 5 milyar (sekitar US\$420.000) sedangkan lembaga pemerintah dilarang keras memberikan sumbangan.

KENAIKAN GAJI ANGGOTA DEWAN

Akhir 2005, dibuatlah keputusan sebagai kompensasi atas merosotnya subsidi negara dengan menaikkan gaji yang di bawa pulang ke rumah anggota dewan, ditambah dengan tunjangan untuk membayar biaya pemeliharaan kantor, tunjangan keluarga dan perumahan, serta sejumlah uang yang disebut "uang kehormatan". Kenaikan itu secara keseluruhan mencapai sekitar 82 persen, sehingga penghasilan bulanan seorang anggota DPR mencapai Rp 50 juta. Ketika kenaikan ini diumumkan, media menuduh politisi "tamak dan tidak peka" sementara sebagian besar penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, guru atau tenaga kesehatan harus bertahan hidup dengan gaji pas-pasan.

Siapa yang akan mewakili rakyat miskin...?

Gaji anggota dewan perwakilan tingkat daerah naik turun seperti yo-yo. Pada bulan Oktober 2005, keluar peraturan pemerintah yang membatasi pendapatan anggota DPRD sementara menaikkan gaji pimpinan fraksi. Hal ini menimbulkan protes dari anggota yang memberikan argumentasi bahwa mereka perlu membayar banyak pengeluaran rutin seperti manajemen partai, pemeliharaan kantor dan pelatihan kader dari gaji pribadi mereka.

Menghadapi keluhan partai-partai yang diantaranya menuduh pemerintah berusaha mengurangi kegiatan sah mereka dan memiliki tujuan politis, pemerintah lalu mengubah keputusan itu pada November 2006 yang memberikan kenaikan 150-200 persen untuk

tunjangan bagi anggota dan pimpinan dewan di tingkat daerah. Keputusan ini disambut dengan protes masyarakat luas, sedemikian keras protesnya sehingga ada partai yang merasa malu karena kritik yang menuduh mereka hanya mencari keuntungan pribadi. Bahkan ada partai menganjurkan wakil-wakil mereka untuk menolak kenaikan atau mengembalikan tunjangan yang telah diterima. Tetapi pada Januari 2007 terjadilah perubahan: keputusan yang sudah diubah drastis itu kembali mengalami revisi sehingga pendapatan legislator jauh lebih rendah dari yang tadinya disetujui.

Tanggapan media dan masyarakat terhadap perubahan-perubahan dalam hal pendapatan ini menunjukkan bahwa mereka tak terlalu menghargai kegiatan wakil rakyat di tingkat daerah ataupun nasional dan tak begitu menyadari bahwa duduk di kursi publik seringkali memerlukan pengeluaran yang memang sah-sah saja. Ini bukannya untuk mengingkari bahwa ada legislator oportunist yang memang menggunakan fasilitas di luar batas, sehingga mengakibatkan merosotnya martabat mereka di mata publik.

Penghasilan bulanan seorang legislator dinaikkan sebanyak 82 persen sementara sebagian besar penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan

Yang membuat keadaan semakin parah, sejak 1999 ada beberapa skandal yang menarik perhatian masyarakat tentang penyelewengan dalam penggunaan uang negara oleh politisi. Tahun 2002, ketua GOLKAR, Akbar Tandjung, diadili, dinyatakan bersalah dan dihukum beberapa tahun penjara karena mengalihkan dana dari Bulog ke yayasan fiktif, yang tak lebih dari cara partai untuk menggalang dana.

Belakangan, Abdurrahman Wahid dituduh menyalahgunakan jabatannya sebagai presiden untuk memakai dana Bulog bagi

kepentingan sendiri dan mengalihkan sejumlah besar uang negara ke yayasan-yayasan yang dekat dengan Nahdlatul Ulama yang diketuainya. Akibatnya, ia diturunkannya dari kursi kepresidenan.

Selain penyalahgunaan sejumlah besar uang untuk mendukung kesepakatan bisnis yang gencar dilakukan partai-partai tertentu, terkuak juga kasus politisi di jajaran kepemimpinan cabang-cabang partai yang menggunakan fasilitas partai untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menggunakan kendaraan dinas dan gedung pertemuan milik negara untuk acara-acara partai.

Dalam kesimpulannya mengenai dampak yang muncul akibat berkurangnya subsidi negara untuk partai dan keputusan yang saling berlawanan tentang penghasilan pribadi anggota dewan, Mietzner menulis:

“Dalam hal ini sulit untuk tidak memandang Peraturan Pemerintah No 37/2006 yang dengan drastis menaikkan gaji anggota dewan tingkat daerah sebagai suatu usaha yang janggal untuk memberi kompensasi atas anjloknya subsidi langsung dari negara pada tahun sebelumnya. Tetapi kerugian partai politik sebagai akibat dari kompensasi yang direncanakan ini cukup besar dengan banyaknya tuduhan memperkaya diri sendiri dan korupsi, hingga reputasi mereka kian merosot. Dengan hilangnya sebagian besar subsidi negara, eksploitasi sumber daya dewan dan pemerintah kini menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi partai politik, sehingga menimbulkan publikasi yang semakin negatif dari pada sistem pembayaran tahunan sebelum tahun 2005.”

Meningkatnya peran pengusaha, baik lelaki maupun perempuan, dalam partai politik juga tercermin melalui semakin terasanya keberadaan mereka dalam dewan. Mietzner mengutip riset tahun 2006 yang menunjukkan bahwa 39.8 persen dari semua anggota DPR tahun 2004 adalah pengusaha, yang merupakan peningkatan pesat dibandingkan tahun 1999. Dalam PAN (Partai Amanat Nasional), tak kurang dari 60 persen anggotanya adalah pengusaha yang mendapatkan kursi terutama berkat sumbangan pribadinya. Mietzner mengutip

salah seorang anggota PAN ‘hanya pemilik perusahaan yang dapat bertahan dalam dewan’. ‘Jika saya memikirkan berapa besar kekayaan pribadi saya yang sudah habis dalam politik, saya bisa sakit.’

BADAI KRISIS KEUANGAN 2008

Serangan krisis keuangan global sudah tentu telah memberikan pukulan hebat bagi pendanaan partai politik. Dampaknya telah terasa terutama di kalangan partai yang sangat tergantung pada donor berkantong tebal dari dunia usaha.

Eksploitasi sumber daya dewan dan pemerintah kini menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi partai politik

Menurut mingguan *Gatra*, dalam analisisnya yang terbit pertengahan Desember 2008, di antara partai yang terpaksa harus mengetatkan rencana pengeluaran mereka adalah PAN yang ketua umumnya sendiri, pengusaha kaya Soetrisno Bachir, mengatakan bahwa partainya mau tak mau harus mengurangi pengeluaran untuk iklan yang mahal seperti iklan TV dan berfokus pada media cetak dan radio. Rencana pengeluaran akan dikurangi sebesar 70 persen, dari Rp 500 milyar menjadi sekitar Rp150 - 200 miliar. Sumbangan bagi partai telah merosot seraca dramatis karena besarnya kerugian keuangan perusahaan-perusahaan pendukung PAN, sebagian bahkan sekarang bangkrut. Kerajaan bisnisnya sendiri, yang meliputi perdagangan luar negeri, konstruksi, real estate, agribisnis serta saham yang membawa kerugian triliunan rupiah. Penghematan akan dilakukan dengan membatalkan pertemuan di hotel atau restoran mewah. Pembagian hadiah seperti kaos juga akan dikurangi.

Golkar yang memperoleh kursi terbesar di DPR tahun 2004 juga banyak tergantung pada sumbangan pengusaha. Ketuanya sekarang,

Jusuf Kalla, yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden RI sejak 2004, juga pengusaha kaya. Ia tak bersedia mengungkapkan berapa anggaran partainya untuk pemilu mendatang, tetapi ia mengatakan kepada *Gatra* bahwa anggaran akan dikurangi 30 – 40 persen. Meskipun demikian pengeluaran tahun 2009 akan lebih besar dari anggaran dari pemilu sebelumnya, katanya. Partai lain dari jaman Orde Baru, PPP juga mengakui bahwa mereka akan mengencangkan ikat pinggang tetapi enggan mengatakan kepada mingguan itu seberapa banyak penghematan yang diperlukan.

Serangan krisis keuangan global tanpa dapat dicegah telah memberikan pukulan hebat bagi pendanaan partai politik

Satu-satunya partai yang mengaku bahwa ia dapat menghadapi badai krisis keuangan adalah Gerindra, yang didirikan tahun 2008 dan ketuanya Prabowo Subianto, sudah mengumumkan keinginannya untuk menjadi presiden tahun 2009. Prabowo, yang menikah dengan putri Suharto pada masa Orde Baru (lalu bercerai) diketahui memiliki sejumlah besar uang di bank di Eropa Barat; ia juga mendapat dukungan dari adik lelakinya yang kaya dan sekarang tinggal di London. Penampilan Prabowo di televisi tak berhenti. Ia juga bermaksud membeli surat kabar untuk menyampaikan pesannya. Survei jajak pendapat baru-baru ini menempatkan Prabowo pada urutan atas di antara calon presiden yang prospektif. Banyak orang lantas menyimpulkan bahwa ia meraih peringkat tinggi karena kemampuannya membayar iklan TV.

Penampilan di televisi hanyalah singkat dan terfokus pada pengumpul suara utama partai saja, tetapi metode visual jelas memiliki lebih banyak keuntungan daripada media cetak. Metode ini dapat membuat tokoh masyarakat menjadi populer dan efeknya terasa lama daripada iklan koran di tengah masyarakat

yang masih banyak buta huruf atau hanya bisa membaca sekedarnya.

Gatra menyodorkan fakta bahwa partai lain yang masih sanggup membayar iklan pemilu di TV hanyalah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) meskipun frekuensinya jauh lebih kecil dari Gerindra. Menurut mingguan ini, bulan Oktober 2008 enam partai memasang iklan di Trans 7, dan jumlahnya merosot menjadi dua pada bulan Desember. PKS adalah satu dari segelintir partai lama yang tumbuh kian kuat dan semakin bergantung pada keaktifan kadernya agar melakukan kunjungan ke cabang-cabang untuk bertemu langsung dengan anggota dan calon pendukung mereka.

PKS tumbuh kian kuat

PDI-P banyak diuntungkan dengan keberadaannya dalam naungan Taufik Kiemas, suami sang ketua umum partai, mantan presiden Megawati Sukarnoputri. Meskipun Taufik Kiemas memiliki sejumlah usaha sendiri, termasuk selusin stasiun pengisian BBM lengkap dengan restoran dan gerai-gerai sejenisnya, pemilu 2004 merupakan bencana keuangan dan politik bagi PDI-P. Meskipun saat itu masih berkuasa, Megawati kalah telak dari duet SBY-Kalla sementara partainya sendiri kehilangan posisi sebagai partai terbesar. Tak lama setelah itu terjadi perpecahan ketika pengusaha-pengusaha penting termasuk taipan minyak Arifin Panigoro dan mantan menteri Laksamana Sukardi meninggalkan partai

Wakil sekjen PDI-P mengatakan kepada media bahwa partai itu banyak bergantung pada sumber keuangan para kandidat untuk membayar ongkos pemilu tetapi ini tak sepenuhnya benar karena banyak gubernur dan kepala daerah merupakan pendukung setia PDI-P yang mampu mengeluarkan sejumlah besar uang. Ini juga tampaknya menjadi kekuatan bagi Partai Demokrat, yang merupakan kendaraan politik Presiden SBY. Bisa dikatakan bahwa dari daftar kandidat partai-partai yang lebih besar, terdapat banyak calon yang mempunyai banyak uang sementara calon yang lebih muda perlu bergantung pada dukungan keuangan dari teman, keluarga dan juga dari partai. Banyak partai kecil yang bertarung dalam pemilu

didirikan dan dijalankan oleh pengusaha kaya. Tampaknya terjun dalam kancah politik kini merupakan hobi orang-orang yang sukses besar dalam mencari uang.

Meskipun kampanye secara resmi baru mulai Januari 2009, jalanan di kota-kota besar telah penuh poster, umbul-umbul dan bendera partai pada semester kedua tahun 2008. Beberapa surat kabar meramalkan bahwa akibat krisis global, hanya akan ada dua calon presiden yang siap mengeluarkan sebanyak Rp 1 triliun untuk kampanye mereka.

**Tampaknya terjun dalam
kancah politik kini
merupakan hobi orang-orang
yang sukses besar dalam
mencari uang**

President SBY (yang belum banyak berkampanye) akan didukung oleh Hartati Murdoyo, yang tak dapat disangkal merupakan perempuan terkaya di Indonesia, bersama dengan Aburizal Bakrie yang kini adalah Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, anak tertua dari keluarga pengusaha kaya. Sebelum kemerosotan ekonomi, Bakri termasuk konglomerat terkaya di Indonesia, tetapi karena lilitan hutang, ia mungkin tak lagi berada dalam posisi 10 besar orang terkaya.

Sementara tak ada yang dapat meramalkan akhir krisis keuangan, partai-partai politik semuanya terpaksa mengkaji ulang strategi kampanye pemilu mereka dan banyak tergantung pada kegiatan kader-kader daerah dan anggota-anggota mereka dalam berkampanye untuk menggalang suara. Hal ini dapat memaksa partai untuk menarik dukungan akar rumput dan memastikan bahwa program mereka banyak mencerminkan isu-isu ekonomi dan sosial yang mendesak yang menghimpit sebagian besar penduduk Indonesia, seperti pengangguran dan tidak adanya fasilitas medis gratis bagi ibu dan anak, serta pendidikan gratis bagi semua anak, yang

kesemuanya itu sedihnya tak dapat dijumpai di sebagian negara ini.

Seperti yang terlihat dalam peristiwa belakangan ini, kecenderungan merosotnya ekonomi baik di dunia maupun di Indonesia merupakan pengalaman yang menyakitkan. Tetapi bisa juga berakibat positif kalau hal ini mendorong partai untuk lebih bergantung pada anggota biasanya dan masyarakat luas.